



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SEKRETARIS JENDERAL
PADA PEMBUKAAN RAPAT KERJA MAHKAMAH
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020**

Jakarta, 5 Desember 2020

Pertama-tama, tak henti-hentinya kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan perkenaan-Nya, kita dapat menghadiri acara Pembukaan Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 dan Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai pada hari ini dalam keadaan baik, sehat *wal'afiat*, tak kurang suatu apapun.

Kepada Pegawai dan handai taulan yang saat ini sedang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh dan sehat kembali. Amiin.

Yang Mulia Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Ibu dan Bapak Hakim Konstitusi, serta Peserta Rapat Kerja yang saya hormati,

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami melaporkan persiapan pelaksanaan Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 dan Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai yang diselenggarakan di Jakarta secara daring (*online*), mulai hari ini, Sabtu, 5 Desember s.d. Minggu, 6 Desember 2020. Adapun jumlah peserta yang mengikuti Rapat Kerja kali ini berjumlah **359 orang** yang terdiri dari Yang Mulia Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi, Dewan Etik, para Pejabat Struktural dan Fungsional, serta pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dari jumlah tersebut peserta WFO sebanyak **231 orang** dan peserta yang WFH sebanyak **128 orang**.

Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi tahun ini mengambil tema mengenai "**Mewujudkan Demokrasi Konstitusional Pilkada Serentak Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19**". Sebagai info, kami laporkan terdapat 19 pegawai yang saat ini positif Covid-

19 dari 523 pegawai yang telah melakukan swab test. Langkah-langkah penanganan dan terus berlangsung antara lain:

1. Pegawai yang positif dirujuk dan didampingi ke wisma atlet atau karantina mandiri di rumah masing-masing sesuai kondisi kesehatan;
2. Memberikan multi vitamin;
3. Memberikan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan;
4. Melakukan penyemprotan disinfektan di semua lantai dan area kerja dalam gedung MK;
5. Memonitoring kondisi kesehatan masing-masing pegawai *aquo*;
6. Mengingatkan melalui SMS Blash kepada pegawai untuk senantiasa menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, baik di kantor maupun di luar kantor. Dan tidak usah panik jika ada pegawai yang positif.
7. Melakukan swab test antigen secara berkala sekali perbulan sebagai pelaksanaan 3T (*testing, tracing, treatment*).

Yang Mulia Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Ibu dan Bapak Hakim Konstitusi, serta Peserta Rapat Kerja yang saya hormati,

Terkait dengan pelaksanaan penanganan PHPKada Serentak dapat kami laporkan sebelumnya mengenai evaluasi PHPKada Serentak tahun 2018. Pilkada serentak tahun 2018 yang digelar di 171 daerah dengan perincian 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten telah berlangsung dan berdasarkan data yang telah diolah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, pada PHPKada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi telah menerima dan memutus 72 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari 72 perkara tersebut jika berdasarkan daerah pemilihan maka terdapat 58 daerah yang mengajukan permohonan dimaksud. Selain itu, jika berdasarkan cara pengajuan maka terdapat 18 permohonan yang diajukan secara *online* dan 54 permohonan diajukan secara *offline*.

Secara keseluruhan perkara PHPKada tahun 2018 yang telah diputus oleh Mahkamah berjumlah 72 dengan rincian:

- 2 perkara dikabulkan oleh Mahkamah;
- 6 perkara ditolak oleh Mahkamah;
- 61 perkara tidak dapat diterima;
- 2 perkara dinyatakan gugur; dan
- 1 perkara ditarik kembali oleh Pemohon.

Belajar dari pengalaman menangani perkara PHPkada tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya maka pada penanganan perkara PHPkada tahun 2020/2021 tentunya harus lebih ditingkatkan kesiapan dan persiapannya. Situasi dan kondisi penanganan perkara PHPkada tahun-tahun sebelumnya berbeda jauh dengan situasi dan kondisi penanganan perkara PHPkada tahun ini terutama karena berlangsung dalam masa pandemi Covid-19. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa terdapat 270 daerah pemilihan dengan 741 pasangan calon (paslon) yang akan melaksanakan pilkada tahun ini. Oleh karena itu, untuk penanganan perkara PHPkada kali ini akan kita jumpai tantangan yang mungkin berbeda dengan penanganan perkara PHPkada sebelumnya.

Yang Mulia Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Ibu dan Bapak Hakim Konstitusi, serta Peserta Rapat Kerja yang saya hormati,

Berdasarkan hasil rapat antar-unit kerja di Mahkamah Konstitusi, maka di dalam Rapat Kerja ini kami mengagendakan secara khusus agar dilakukan ***pertama***, evaluasi terhadap penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPKada) Serentak 2018, ***kedua***, pemaparan mengenai capaian kinerja tahun 2020, ***ketiga*** pembahasan mengenai persiapan dukungan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPKada) Serentak 2020/2021, serta ***keempat***, pembahasan rencana aksi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal tahun 2021 pasca penanganan PHPKada.

Agar pembahasan dalam Rapat Kerja ini dapat berjalan dengan efektif dan terarah, kami telah mempersiapkan bahan-bahan materi terkait sekaligus telah menginventarisir hal-hal yang memerlukan pembahasan dan kesepakatan serta arahan dari Yang Mulia Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi.

Untuk membahas keempat agenda utama tersebut, kami telah membagi Rapat Kerja ini ke dalam dua sesi pembahasan, yaitu: **Sesi I** pada hari Sabtu pagi, untuk membahas mengenai evaluasi penanganan PHPKada Serentak 2018, capaian kinerja tahun 2020, dan persiapan dukungan penanganan PHPKada Serentak 2020/2021. Pada sesi ini masukan, tanggapan, dan arahan dari Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Konsitusi kami harapkan untuk menjadi panduan pada sesi II di hari Minggu.

Kemudian, **Sesi II** pada Minggu pagi akan disampaikan presentasi mengenai dukungan masing-masing unit kerja dalam penanganan perkara PHPkada 2020/2021 termasuk membahas rencana program dan kegiatan lainnya (renaksi) di tahun 2021 dalam rangka mendukung tugas konstitusional Yang Mulia Bapak dan Ibu Hakim.

Oleh karena banyaknya materi penting yang perlu dibahas bersama, sementara waktu yang tersedia juga terbatas, maka pembagian sesi tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat dilakukan lebih terarah guna

memperoleh hasil yang optimal, khususnya terhadap hal-hal yang memerlukan tanggapan, masukan dan arahan dari Yang Mulia Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi. Adapun hasil dari pembahasan tersebut akan dirumuskan dan dituangkan ke dalam *Executive Summary* yang kemudian akan kami laporkan kepada Yang Mulia Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi pada acara Penutupan Rapat Kerja nanti.

Yang Mulia Bapak Ketua dan Wakil Ketua, Ibu dan Bapak Hakim Konstitusi, serta peserta Rapat Kerja yang saya banggakan,

Dalam Laporan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi yang telah memberikan dukungan penuh atas terlaksananya Rapat Kerja dan Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai kali ini. Kemudian, kepada seluruh Panitia yang telah bekerja keras dan penuh ketulusan dalam mempersiapkan kegiatan ini, khususnya Biro Perencanaan dan Keuangan, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kepada para pegawai

Mahkamah Konstitusi, seluruh peserta Rapat Kerja, kami juga menghimbau agar mengikuti dan mencermati seluruh sesi pembahasan dan kegiatan Rapat Kerja ini dengan baik dan saksama. Sehingga, kita semua akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang mungkin terjadi.

Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankan saya mengutip pernyataan Henry Ford yang pernah mengatakan hal sederhana yang penuh makna, "*Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.*" Datang bersama adalah permulaan, menjaganya agar bersama adalah kemajuan, bekerja bersama adalah kesuksesan.

Selanjutnya ijinkan saya menutup laporan ini dengan dua bait pantun untuk menambah suasana Rapat Kerja yang lebih hangat dan penuh kebersamaan.

Sirup lemon, biji selasih

Pandemi covid, membawa sedih

Ambil hikmahnya, tetaplah gigih

Agar diri, terus terlatih

Pergi ke gunung, untuk tamasya

Kita diberi talenta, untuk berkarya

Tetap semangat, dan percaya

Kita pasti bisa, dan jangan lupa doa ya

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami mohon perkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **Bapak Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.** untuk memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 dan Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai ini secara resmi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Om shanti shanti shanti oom.

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**